

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dari negara agraris menuju negara industri. Untuk menjadi negara industri tersebut Indonesia mengadakan pembangunan di berbagai sektor, baik fisik maupun non fisik. Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual. Bahwa pembangunan bukanlah semata-mata untuk mengejar benda-benda material saja, tapi yang lebih mendasar yaitu untuk membangun manusia seutuhnya.

Dalam pembangunan memerlukan perencanaan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dan dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu perencanaan pembangunan adalah suatu pekerjaan yang rumit yang membutuhkan banyak waktu, serta macamnya sangat banyak tergantung dari sasaran yang diinginkan kita juga tercapai, modal yang digunakan,

instrumen-instrumen, kebijakan dan faktor-faktor sesuai politik dan kebudayaan suatu negara.

Penduduk Indonesia juga sangat banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mendiami pedesaan maupun perkotaan, termasuk penduduk yang ada di Kotamadya Bekasi. Kota Bekasi merupakan kota penyangga ibukota Jakarta yang tergabung dalam Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dimana pola dan perencanaan pembangunan harus sinergi dengan pembangunan kota Jakarta, baik sarana maupun prasarananya. Penduduk kota Bekasi sebagian besar bekerja di Jakarta sehingga mobilitas penduduk Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya dari Jakarta ke Bekasi sangat tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik penduduk kota Bekasi tahun 2014 yang meliputi beberapa kecamatan yang berada di Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medansatria dan Bekasi Utara adalah jumlah laki-laki di Kota Bekasi lebih tinggi yaitu sebesar 1.344.022 jiwa, dibandingkan dengan jumlah perempuan di Kota Bekasi yaitu sebesar 1.318.989 jiwa berdasarkan pada tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2014 yaitu 2.663.011 jiwa.

Untuk itu dengan menyeimbangkan dan memfasilitasi masyarakat agar lebih baik dari segi sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur sangat diperlukan untuk

menunjang masyarakat agar lebih berkualitas baik dari segi meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan Infrastruktur Jalan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan wilayah suatu daerah dimana infrastruktur fisik memiliki peran penting bagi sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi seperti distribusi barang dan jasa.

Menurut Syahputri (2013) menjelaskan bahwa jalan dan kondisi baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaannya dengan menurunkan biaya sosial dan biaya produksi. Firdaus dan Prasetyo (2009) yang menjelaskan bahwa jalan memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dalam kegiatan distribusi produksi atau barang dan jasa hasil produksi sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur jalan. Selain itu, penambahan jumlah panjang jalan dapat meningkatkan keterbukaan akses antar produktivitas ekonomi. Karena Kota Bekasi merupakan kota penyangga ibukota Jakarta yang berbatasan antara Jawa Barat dengan Jakarta. Dan Infrastruktur jalan sangat berpengaruh penting bagi kelancaran transportasi antara perbatasan Jawa Barat dari wilayah-wilayah sekitar Jawa Barat menuju ibukota Jakarta dimana angkutan darat dari wilayah-wilayah di Jawa, khususnya Jawa Barat menuju Ibukota Jakarta pasti akan melintasi Kota Bekasi.

Untuk itu, arus barang dan jasa serta mobilitas masyarakat Kota Bekasi ke Kota Jakarta sangat membutuhkan akses infrastruktur jalan

yang baik dan memadai. Apalagi Kota Bekasi terdapat kawasan industri Bekasi Barat, kawasan industri Bekasi Utara dan Cikarang yang membutuhkan fasilitas Infrastruktur Jalan yang baik dan memadai untuk distribusi barang dan jasa ke wilayah-wilayah lain dan mendukung kegiatan pelaksanaan ekspor impor barang. Untuk itu perlunya infrastruktur jalan di Kota Bekasi. Berikut ini adalah presentase kendaraan yang melintasi tol Jakarta – Cikampek di Bekasi

Tabel 1.1

Banyaknya kendaraan yang melintas Gerbang Tol Kota Bekasi

No	Nama Gerbang Tol	Presentase
1	Ramp Pondok Gede Timur 1	29%
2	Pondok Gede Timur 2	10%
3	Bekasi Timur	21%
4	Bekasi Barat	40%

Sumber : BPS Kota Bekasi

Mengacu pada tabel 1.1 membuktikan bahwa volume kendaraan yang masuk melalui pintu tol yang berada di Kota Bekasi mencapai 43,5 juta dengan jumlah kendaraan terbanyak di tol Bekasi Barat yaitu sebesar 40% dan paling besar persentasenya. Hal ini membuktikan bahwa perlunya pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan mobilitas para penduduk Kota Bekasi untuk dapat melintasi dan beraktifitas ke daerah-daerah sekitar terutama menuju ibukota Jakarta. Berikut ini adalah data mengenai infrastruktur jalan di Kota Bekasi.

Tabel 1.2

Menurut Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Bekasi, tahun 2012 -
2013

No`	Kota	Kondisi Jalan									
		Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat		Jumlah	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Bekasi	1.125,880	1.125,880	-	-	198,680	198,680	-	-	1.324,560	1.324,560

Sumber : Badan Pusat Statistik

Mengacu pada data dari tabel 1.2 diatas kondisi jalan yang rusak di Kota Bekasi masih terbilang cukup tinggi yaitu 198,680 km (15%) dan pembangunan infrastruktur jalan menurut panjang jalan dan kondisi jalan di Kota Bekasi dari tahun 2012 ke tahun 2013 ternyata masih konstan dan tidak berubah, namun untuk pembangunan infratraktur jalannya lebih kearah pelebaran jalan, pengecoran jalan, pemeliharaan jalan, pemenuhan sarana dan prasarana jalan seperti halte, rambu-rambu lalu lintas dan perbaikan jalan yang rusak. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak umumnya disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kualitas aspal yang kurang baik, banyaknya kendaraan bertonase besar seperti: tronton, truk, bis dan jumlah kendaraan yang banyak yang melintasi jalan sekitar Kota Bekasi, keterbatasan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan. Berikut ini adalah salah satu gambar jalan yang rusak di daerah Kota Bekasi.

Gambar 1.1

Kondisi jalan yang rusak di wilayah Kota Bekasi



Sumber : Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi

Gambar ini membuktikan salah satu bukti bahwa infrastruktur jalan di Kota Bekasi masih terdapat jalan yang rusak, gambar tersebut di ambil di daerah Pondok Gede depan pasar modern Kota Bekasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bekasi harus memberikan perhatian yang lebih khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan guna menunjang sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi.

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan Infrastruktur jalan dikatakan dalam kondisi baik apabila memenuhi persyaratan teknik jalan yang terdiri atas ketepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, dan penggunaan jalan sesuai dengan

fungsinya serta tidak terputus dan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur jalan berkaitan erat dengan dana pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kepentingan publik. Berikut ini adalah tabel mengenai Belanja Langsung untuk Modal Pembangunan Infrastruktur Konstruksi Jalan.

Tabel 1.3

PAGU Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Jalan selama tahun 2011 sampai dengan tahun
2013.

No	Keterangan	2011		2012		2013	
		PAGU Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	140.094.984.840	132.707.059.197	289.433.500.000	268.623.189.950	267.940.909.173	201.070.525.862

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Mengacu pada tabel 1.3 bahwa pada tahun 2011 ke tahun 2012 realisasi belanja modal pengadaan konstruksi jalan meningkat yaitu sebesar Rp 135.916.130.800 yaitu sebesar 102,4%, namun pada tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat penurunan belanja pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp 67.552.664.090 yaitu sebesar (25%), karena memang pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2013 lebih memprioritaskan penataan sistem layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, namun dalam hal membangun sarana dan prasarana kota

Pemerintah Kota Bekasi lebih menitik beratkan pada Program pengendalian banjir dan program pembangunan saluran Drainase atau gorong-gorong dan rencana tersebut sudah ditetapkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bekasi tahun 2008 - 2013.

Kemudian dalam hal pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di Kota Bekasi pasti pemerintah Kota Bekasi membutuhkan anggaran untuk itu pemerintah Kota Bekasi membuat anggaran APBD Kota Bekasi setiap tahunnya yang sudah terealisasi untuk melakukan pembangunan daerah di Kota Bekasi. Berikut ini adalah Tabel Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Tabel 1.4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran
2011 - 2013

No	URAIAN	APBD 2011	APBD 2012	APBD 2013
1	PENDAPATAN	2.220.351.536.783	2.683.641.254.956	2.960.580.369.588
1.1	Pendapatan Asli Daerah	568.344.278.997	735.485.659.292	969.664.481.362
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	375.978.082.270	497.833.031.022	723.511.938.746
1.1.2	Hasil Reribusi Daerah	40.075.055.899	45.990.847.615	44.393.113.029
1.1.3	Hasil Dari	7.420.041.890	8.701.219.586	11.364.027.452

	Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.871.098.936	182.960.561.070	190.395.402.135
1.2	Dana Perimbangan	960.002.856.824	1.216.694.015.646	1.193.018.165.096
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	184.165.626.824	256.758.124.646	123.113.143.096
1.2.2	Dana Alokasi Umum	736.741.305.000	935.205.053.000	1.051.235.707.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	39.095.925.000	24.730.838.000	18.669.315.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	692.004.400.962	731.461.580.009	797.897.723.130
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	333.439.801.999	429.476.609.169	481.538.395.572
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	277.188.149.720	174.552.873.000	213.125.791.500
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	81.249.289.529	124.240.024.580	101.531.310.953

	Lainnya			
II	Belanja Daerah	1.906.125.172.825	2.047.578.838.800	3.026.036.053.610
2.1	Belanja Tidak Langsung	932.607.041.779	965.663.256.092	1.256.848.766.580
2.2	Belanja Langsung	973.518.131.046	1.081.915.582.708	1.769.187.287.030
	Surplus/Defisit	314.226.364.000	636.062.441.620	(65.455.684.020)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Mengacu pada tabel 1.4 diatas bahwa pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan, begitu juga dengan belanja pendapatan daerah yang setiap tahunnya juga meningkat. Untuk tahun 2011 mengalami surplus sebesar Rp 314.226.364.000, ditahun 2012 juga mengalami Surplus sebesar Rp 636.062.441.620, namun untuk di tahun 2013 mengalami defisit yaitu sebesar Rp 65.455.684.020 dikarenakan untuk pembelanjaan daerahnya lebih besar dari pada pendapatan daerah sedangkan untuk melakukan pembangunan daerah baik dari segi belanja daerah, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar.

Menurut Mahmudi (2010:56) Apabila seluruh pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi lebih besar dari seluruh belanja yang dilakukan selama periode yang sama maka keuangan pemerintah daerah akan mengalami surplus anggaran. Namun sebaliknya, apabila total belanja yang telah dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima, maka pemerintah daerah akan menderita defisit anggaran. Surplus maupun defisit anggaran di pemerintah daerah bukan merupakan hasil final (*bottom line*) atau tujuan dari laporan realisasi anggaran. Hal

ini berbeda dengan sektor bisnis yang mana rugi atau laba bersih dalam laporan laba rugi merupakan tujuan akhirnya. Dalam laporan realisasi anggaran terdapat komponen pembiayaan. Komponen pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua yaitu pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Apabila terjadi surplus anggaran maka surplus tersebut akan diperhitungkan dalam pembiayaan pengeluaran, sedangkan apabila terjadi defisit maka akan ditutup melalui pembiayaan penerimaan. Jadi meskipun defisit, sebenarnya pemerintah daerah belum benar-benar mengalami kebangkrutan karena masih memiliki sumber untuk menutupi defisit dari pembiayaan penerimaan. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan daerah di tahun yang sama akan digunakan untuk belanja daerah di tahun yang sama.

Kebutuhan untuk melakukan pembangunan infrastruktur termasuk dalam belanja langsung sesuai dengan isi dari Ketentuan Umum APBD Kota Bekasi bahwa khusus untuk alokasi belanja pembangunan infrastruktur/suprastruktur yang proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatannya diperkirakan berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau *multi years*, maka distribusi alokasi rencana anggaran belanjanya untuk masing-masing tahun anggaran merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.

Dengan demikian kebutuhan belanja langsung yang merupakan kebutuhan untuk melakukan pembangunan-pembangunan daerah yang

berasal dari pendapatan daerah yang merupakan hasil dari penerimaan-penerimaan daerah seperti dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan di dalam Pendapatan Asli Daerah terdapat pendapatan pajak daerah dari berbagai macam pajak seperti halnya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Namun untuk penelitian ini akan membahas tentang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Berikut ini adalah tabel pendapatan pajak daerah.

Tabel 1.5

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

No	Keterangan	2011		2012		2013	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	3.299.999.400	3.348.011.541	4.500.000.000	4.062.680.578	4.439.768.300	4.843.348.650
2	Pajak Restoran	43.279.918.850	45.324.573.725	54.237.912.400	58.706.451.527	79.243.776.270	81.662.055.038
3	Pajak Parkir	5.683.734.000	6.051.487.394	7.300.000.000	6.108.187.680	8.635.100.000	8.986.364.412

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Mengacu pada tabel 1.5 diatas bahwa menurut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2013 Bab III mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp 714.669.037 (21,3%) dari tahun 2011 ke tahun 2012, juga pada tahun 2013 meningkat

sebesar Rp 780.668.072 (19,2%). Namun untuk pencapaian target pajak hotel pada tahun 2012 tidak tercapai dan hanya terealisasi sebesar Rp 4.062.680.578 dari target sebelumnya yaitu Rp 4.500.000.000 yaitu 90,28%, sehingga terjadi kekurangan pencapaian targetnya sebesar Rp 437.319.422 diakibatkan karena pada tahun 2012 terjadi belum optimalnya tingkat hunian hotel karena Kota Bekasi pada saat itu bukan tujuan wisata dan belum ada even nasional dan internasional yang diadakan pada saat itu.

Selanjutnya pada penerimaan pajak restoran juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar Rp 13.381.877.802 (29,5%), dan kenaikan juga terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 22.955.603.510 (39,1%), untuk pajak restoran untuk target dan realisasinya setiap tahunnya terus tercapai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya.

Sedangkan untuk penerimaan pajak parkir tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.700.286 (0,09%) cenderung sangat kecil sekali presentase kenaikannya dan dari tahun 2012 ke tahun 2013 kenaikan sebesar Rp 2.878.176.732 (47,1%) kenaikannya hampir 50%. Namun untuk realisasi dari target tahun 2012 pajak parkir tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu tahun 2012 targetnya adalah sebesar Rp 7.300.000.000 dan realisasinya adalah Rp 6.108.187.680 atau hanya sebesar 83,67% sehingga terdapat kekurangan target sebesar Rp

1.191.812.320, kekurangan target terjadi karena adanya wajib pajak yang membebaskan pajak parkir bagi pelanggannya sehingga mereka tidak membayar pajak parkir ke PEMDA. Hal tersebut sangat merugikan pihak pemerintah daerah karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir yang sangat besar.

Untuk pajak restoran sebenarnya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi masih bisa menambah potensi-potensi pajak restoran yang terdapat di Kota Bekasi. Namun banyak dari penyedia restoran di Kota Bekasi masih belum menjadi wajib pajak restoran pada tahun 2013. Berikut ini adalah data wajib pajak restoran yang terdapat di Kota Bekasi pada tahun 2013 dan berikut ini adalah tabel daftar wajib pajak restoran dan jumlah restoran di Kota Bekasi.

Tabel 1.6

Daftar Wajib Pajak Restoran dan Jumlah Restoran di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah WP	Potensi yg belum menjadi WP	Jumlah Restoran
1	Bekasi Barat	81	43	124
2	Bekasi Timur	129	34	163
3	Bekasi Selatan	252	24	276
4	Bekasi Utara	97	12	109
5	Rawalumbu	52	23	75
6	Bantargebang	6	0	6
7	Mustika Jaya	98	32	130
8	Medan Satria	127	14	141
9	Pondok Gede	136	43	179
10	Pondok Melati	27	14	41
11	Jati Asih	54	21	75
12	Jatisampurna	93	24	117
	Jumlah	1.152	284	1.436

Sumber dari Dinas Pendapatan Daerah

Mengacu pada tabel 1.5 mengenai Jumlah Restoran yang ada di Kota Bekasi adalah 1.436 restoran, diantaranya daftar wajib pajak restoran yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak restoran di Kota Bekasi adalah sebanyak 1.152 wajib pajak restoran. Dan potensi-potensi restoran yang

belum menjadi wajib pajak restoran yaitu sebanyak 284 restoran yaitu sebanyak 20% dari jumlah restoran yang belum menjadi wajib pajak restoran. Hal tersebut membuktikan bahwa ternyata masih ada sekitar 20% potensi yang dapat mendongkrak penerimaan pajak restoran. Hal tersebut terjadi karena masih banyak restoran-restoran yang belum taat akan kewajibannya sebagai masyarakat Kota Bekasi yang baik agar ikut mensukseskan pembangunan di Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh dalam kontribusi pemungutan pajak daerah dengan mengambil judul **”Pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bekasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Infrastruktur jalan yang masih harus diperbaiki di Kota Bekasi yaitu sebesar 15%
2. Target pajak hotel belum tercapai
3. Target pajak parkir belum tercapai
4. Sekitar 20% penerimaan pajak restoran yang masih harus dipungut

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada apakah ada pengaruh kontribusi pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bekasi pada tahun 2011-2013. Untuk menghitung pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir menggunakan perhitungan rumus analisis kontribusi dan untuk menghitung pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan perhitungan teori alokasi belanja modal.

D. Perumusan Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan di daerah dan Kota tersebut. Seberapa besar pengaruhnya kontribusi pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan-permasalahan berikut :

1. Apakah Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bekasi?
2. Apakah Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bekasi?
3. Apakah Kontribusi Pemungutan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bekasi?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan dengan adanya penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, tentunya di bidang Akuntansi. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan ide untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pajak daerah dan pembangunan infrastruktur jalan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Bagi penulis dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang kontribusi pemungutan pajak daerah dan dampaknya positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kota Bekasi.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kota Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan ide terhadap kontribusi pemungutan pajak daerah untuk pembangunan sektor infrastruktur jalan.